

JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER



Diajukan oleh:

NORCE HORLIN MAK MOMAO

N P M : 130511319
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
MILITER**



Diajukan oleh:

NORCE HORLIN MAK MOMAO

N P M : 130511319
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 22 Desember 2016
Dosen Pembimbing,**

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER

Norce Horlin Mak Momao

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ochekamo@yahoo.com

Abstract

This research titled Witness Protection Program for Victims of Domestic Violence By The Military. The type of this research is normative legal research. It focuses on the positive legal norms of legislation and it is done by studying the role of acting related to research problems. The literature used in this research are taken from regulations, books, journals, legislation, dictionary and website. The purpose of this research is to identify the form of protection from the state to the witness of domestic violence victim by the military. Protection which are given to the witness of domestic violence victim are divided into three parts, such as: 1). The protection of victims in general 2). The protection of victims in particular 3). The protection of victims in more particular way which is the protection by the state to the witness of domestic violence victim by the military. The data is obtained from A Judge at the Military Court II 11 Yogyakarta, Mrs. Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk (K) NRP. The result showed various forms of criminal acts of domestic violence, the efforts and obstacles that may occur in protecting the witness and to guarantee the rights of domestic violence victims by the government. Therefore, to guarantee the right of domestic violence victim which is done by the government, it needs the role of law enforcement and also the active role of domestic violence victim that is committed by the military to fight for their rights.

Keywords: protection, the witness, the crime of domestic violence, military

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, salah satu contoh nyata keadilan dinegara negara kita Indonesia yaitu dalam proses beracara di pengadilan, pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban tetapi negara juga wajib melindungi para pihak didalam bersengketa di pengadilan, contoh nyatanya peran saksi. Saksi sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pemeriksaan perkara di pengadilan, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan nama KUHAP)

salah satu alat bukti yang sah dalam berproses acara di pengadilan adalah keterangan saksi, terutama yang yaitu keterangan saksi korban.

Saksi sendiri menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. KUHAP berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia, meskipun KUHAP berlaku umum ada pula aturan lain diluar KUHAP yang mengatur khusus bagi orang-orang tertentu, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya

disingkat dengan nama KUHPM). KUHPM merupakan ketentuan hukum yang mengatur seorang militer, tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.

Korban di lingkungan Peradilan Militer yang kedudukan sebagai saksi sangat penting sama halnya dengan saksi di Peradilan Umum, alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer salah satunya adalah keterangan saksi. Korban yang berkedudukan sebagai saksi disebut juga saksi *a charge* yaitu keterangan seseorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta biasa diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali diperiksa adalah saksi *a charge* mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *a charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Faktanya tidak ada saksi yang sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu ada sejumlah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari mafia, selain itu, saksi juga ketakutan dengan tindakan balasan dari kelompok mafia kejahatan tersebut di manapun mereka berada.

Banyaknya saksi, korban, dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik kepada aparat penegak hukum sampai dengan di depan pengadilan

karena minim jaminan yang memadai atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi dan korban tidak mau dan tidak berani memberi keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang terkait kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lain yang mengancam korban.

Dilihat dari tingkat kejahatan yang terorganisir dan ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban, tentunya ancaman dari pelaku akan terus mengintai saksi meski terpidana sudah selesai menjalani hukumannya.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan diharapkan dapat menjamin hak-hak dari korban itu sendiri, namun dalam penerapannya undang-undang ini belum efektif dan belum mencapai tujuan. Dilihat dari tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat dengan nama LPSK) untuk melindungi para saksi dan korban. Ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang dialami oleh saksi korban yang keberadaannya adalah sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku, misalnya dari tindak pidana militer salah satunya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat dengan nama KDRT) yang di lakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (yang

¹Maharani Siti Shopia, S.H.,2012, *Perlindungan Saksi dan Korban*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc83ea563cc9/perlindungan-saksi-dan-korban>.

Diakses pada tanggal 5 September 2016. Pukul 07.14 WIB.

selanjutnya disingkat dengan nama TNI).

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku-buku yang berkaitan, perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban pada tindak pidana militer, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Yang berupa bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 mengenai hak-hak

yang berkaitan dengan saksi korban.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban di lingkungan peradilan militer, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang adalah aparaturnya militer di pengadilan militer Yogyakarta mengenai perlindungan bagi saksi korban tindak pidana KDRT dalam

- lingkungan peradilan militer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode mengumpulkan data yang digunakan adalah :
- a. Studi Kepustakaan Penelitian dengan mencari dan mempelajari dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, surat kabar, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi guna tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber. Narasumber yaitu aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT di lingkungan peradilan militer.
4. Metode Analisis Data
Bahan hukum primer
- a) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT dalam lingkungan peradilan militer.
- 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang tinjauan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer.
- 2) Sistematikasi hukum positif secara vertikal ada sinkronisasi karena tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. sistematikasi secara horizontal

- ada harmonisasi, prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sejajar, sehingga tidak diperlakukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif
Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open sistem* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi atau dikaji).
- 4) Interpretasi hukum positif
Yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal

ini menilai tentang perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT dalam lingkungan peradilan militer.

- b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan hukum dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku(literatur) j uurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

5. Prose Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan maka digunakan proses berpikir secara deduktif. Metode berfikir deduktif adalah proses berfikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta berupa perundang-undangan tentang perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT di lingkungan peradilan militer yang bersifat umum.

3. HASIL PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan saksi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota Militer di Pengadilan Militer di lakukan dengan berbagai macam upaya. Upaya yang dilakukan dalam hal ini yaitu upaya perlindungan bagi korban tindak pidana KDRT yang setiap waktu laporan tentang tindak pidana KDRT semakin meningkat, maka dibentuklah undang-undang untuk melindungi korban KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut narasumber hakim di Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta Ibu Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk (K) NRP mengatakan bahwa sebelum laporan tentang tindak pidana KDRT dibawa ke pengadilan ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh kesatuan yaitu seorang komandan untuk melindungi anggotanya karena fungsinya sebagai orang tua untuk melindungi dan mengayomi anggotanya dengan melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi yaitu dengan upaya preventif:

a. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi tiupaya ini dilakukan diluar pengadilan yaitu diberlakukan di masing-masing satuan karena setiap kesatuan wajib menjaga keharmonisan dalam keluarga setiap anggota militernya maka dalam upaya pecegahannya dapat dilakukan dengan :

1) Pengarahan Saat Apel

Pengarahan saat apel dilakukan guna menjaga kekompakan dan kedisiplinan TNI dengan pembina apel memberikan arahan yang baik dan

benar termasuk pencegahan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh TNI.

2) Jam Komandan

Hampir mirip dengan apel, kalao apel dilakukan secara formal sedangkan jam komandan penyelenggaraannya lebih membaur seperti keluarga atasan sebagai orang tua yang ingin menasehati anak-anaknya yaitu anggotanya, selain merupakan sebagai media tatap muka langsung antara anggota dengan komandan, juga merupakan sambung rasa antara atasan dan bawahan, sebagai ajang komunikasi timbal balik serta sebagai media yang sangat efektif. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan arahan, pembekalan atau pengantar tugas dinas serta sebagai media untuk meneruskan kebijakan pimpinan dari satuan.

3) Ikatan Istri TNI

Dengan adanya ikatan atau kumpulan dari istri-istri TNI dalam suatu kesatuan biasanya para istri ini berkumpul minimal sebulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung mkasing-masing kesatuannya. Tujuan dari kumpulnya itu selain melakukan kegiatan-kegiatan positif yaitu kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat, salah satunya tujuannnya juga yaitu saling tukar iformasi, dari situ mereka akan dapat informasi.

Upaya preventif yang dijelaskan diatas diterapkan agar dikemudian hari tiadak akan terjadi tindak pidana, selain dari upaya preventif ada juga upaya represif yang dapat dilakukan yaitu :

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi KDRT yang dilakukan oleh militer jika ada laporan yang sudah masuk ke Pengadilan Militer, dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sapai dengan tahap pelaksanaan putusan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Senbelum berlanjut pada proses penyidikan biasanya pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak dalam tindak pidana KDRT untuk bermusyawarah yaitu dengan jalur mediasi yang di dampingi oleh masing-masih kuasahukum untuk upaya damai yang dipimpin oleh seorang mediator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber hakim di Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta Ibu Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk (K) NRP. Menegaskan bahwa : “Berbeda orang umum dengan militer kalau orang umum jika ada laporan tentang tindak pidana KDRT langsung di proses sedangkan kalau militer ada prosedurnya, karena militer sendiri masing-masing mempunyai kesatuan entah tiga angkatan yaitu, tentara nasional angkatan darat (TNI-AD), tentara nasioanl angkatan udara (TNI-AU), dan tentara nasional angkatan laut (TNI-AL).

Kesatuan mereka itu suda seperti orang tua yang berkewajiban mengontrol melindungi semua anggota TNI dan semua aktivitas yang dilakukan oleh TNI, oleh karena sifatnya sebagai orang tua maka jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan oleh TNI yang terutama mengetahui adalah kesatuan yang dimana kesatuan itu sendiri yang utama berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebalum dibawa ke pengadilan Militer.”

Proses perlindungan korban saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan di Pengadilan Militer yaitu mulai dari :²

1) Tahap Penyidikan

Hukum acara pidana militer penyidikan dilakukan oleh atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer namun demikian kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan atau Oditur.

2) Tahap penyerahan perkara

Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam

² Mendy C. Maridjan, 2015, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota TNI di Tinjau Dari UNDANG-UNDANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Lex Crimen, hlm 177.

Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Tahap ini, Oditur Militer setelah menerima penyerahan perkara dari Penyidik Polisi Militer melakukan penelitian atas persyaratan kelengkapan formil dan materiil berkas tersebut, bila berkas tersebut kurang memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Penyidik Polisi Militer disertai petunjuk untuk melengkapinya, sedangkan bila berkas perkara telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Oditur Militer membuat Surat Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara (SPH) kepada Papera disertai dengan Konsep Surat Keputusan.

Penyerahan Perkara dilakukan apabila Papera menyetujui saran pendapat dari Oditur maka Papera akan mengirimkan kembali

Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Militer melalui Oditur Militer, selanjutnya Oditur Militer melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Militer, dilengkapi dengan surat dakwaan. Menurut narasumber hakim di Pengadilan militer Yogyakarta Ibu Silveria Supanti, SH., MH.Mayor Chk (K) NRP. Mnegaskan bahwa proses penyerahan perkara di Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta khususnya perkara tindak pidana KDRT dilakukan sama halnya dengan tindak pidana lain selain pelapor tidak mencabut laporannya dan laporan itu memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti.

- 2) Tahap pemeriksaan dalam persidangan
Pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya Pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer II 11

Yogyakarta khususnya untuk perkara tindak pidana KDRT. Hakim Pengadilan militer Ibu Silveria Supanti, SH., MH.Mayor Chk (K) NRP. Mengatakan bahwa selama dalam perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer hampir sama hanya dengan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh orang sipil. Proses acara sidang menggunakan sidang terbuka untuk umum. Namun dalam hal-hal penjelasan mengenai kesusilaan tidak diperkenankan diberitahukan dimuka umum.

- 3) Tahap Pelaksanaan Putusan
Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh

Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

Menurut narasumber hakim di Pengadilan Militer II 11 Ibu Silveria Supanti, SH., MH.Mayor Chk (K) NRP. Mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan putusan di pengadilan Militer II 11 Yogyakarta, setelah putusan dijatuhkan hakim tidak hanya membiarkan tetapi ikut mengontrol perkembangan dari terpidana juga memberikan perlindungan bagi korban sendiri agar ada rasa aman yang didapat.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI adalah dengan menerapkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga memproses pelaku dengan dikenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perlindungan terhadap saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer dibedakan dengan orang umum yaitu dalam militer dikenal adanya kesatuan yang tidak hanya melindungi dan mengayomi setiap anggotanya tetapi juga berwenang melindungi setiap anggota keluarga militer yang membutuhkan bantuan dalam hal ini yaitu saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota militer.

5. REFERANSI

JURNAL :

Mendy C. Maridjan, 2015, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota TNI di Tinjau Dari UNDANG-UNDANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Lex Crimen.

Website :

Maharani Siti Shopia ,2012, *Perlindungan Saksi dan Korban*,
[http://www.hukumonlin
e.com/klinik/detail/lt4fc8
3ea563cc9/perlindungan
-saksi-dan-korban](http://www.hukumonlin
e.com/klinik/detail/lt4fc8
3ea563cc9/perlindungan
-saksi-dan-korban)

Ari Supriadi, 2016. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3713. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635. Sekretariat Negara. Jakarta Jo (Juntco) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 5603. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentnag Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Sekretariat Negara. Jakarta.